BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia senantiasa dihadapkan pada tantangan dalam mencapai keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak asasi pelaku kejahatan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penanganan perkara pidana yang melibatkan tindak kekerasan fisik, seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan, baik yang tergolong ringan maupun berat, seringkali berakhir dengan hukuman penjara, yang tidak selalu memberikan dampak positif bagi rehabilitasi pelaku maupun pemulihan korban (Sihombing, 2024: 8902).

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada upaya pemulihan, bukan sekadar memberikan hukuman. Melalui pendekatan ini, pelaku diharapkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Bagi korban, keadilan restoratif berupaya memberikan ruang bagi pemulihan fisik dan psikologis, serta memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara (Flora, 2018: 158).

Hal ini kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 15 ayat 2 dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur tentang penghentian penuntutan yang berbunyi “Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan” dengan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih mengutamakan perdamaian antara pelaku dan korban, serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui cara yang lebih membangun dan tidak hanya dengan hukuman pidana. Bunyi Pasal 15 ayat 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Jaksa dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan ini” . Pasal 15 ayat 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur tentang penghentian penuntutan memberikan jalan bagi penghentian penuntutan dalam perkara-perkara yang memungkinkan diselesaikan dengan cara *restorative justice* (Rosadi, 2022: 109).

Dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende, ditemukan sejumlah alasan penting yang mendorong perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu alasannya adalah adanya perbedaan penerapan keadilan restoratif antara kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi, yang mencerminkan tantangan nyata dalam konsistensi penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada kasus Winda Dewanti, proses penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif berjalan dengan lancar karena terdapat kesepakatan antara korban dan tersangka. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur bahwa penghentian penuntutan mensyaratkan adanya kesepakatan damai. Namun demikian, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana pihak kejaksaan menilai kelayakan atau ketulusan dari perdamaian tersebut, apakah semata untuk memenuhi formalitas prosedur atau benar-benar untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

Dalam konteks tersebut, kejanggalan yang perlu diteliti lebih dalam adalah bagaimana standar atau ukuran Kejaksaan Negeri Ende dalam memverifikasi iktikad baik dari para pihak. Apakah cukup dengan surat pernyataan damai, ataukah ada mekanisme tambahan untuk memastikan bahwa pemulihan benar-benar terjadi secara substantif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bunyi Pasal 5 huruf b menyatakan bahwa syarat dilakukannya penghentian penuntutan adalah "Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Selain itu, dalam kasus Rustam Efendi, terlihat ketidakmampuan atau keterbatasan Kejaksaan dalam mendorong terwujudnya keadilan restoratif karena korban menolak untuk berdamai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa upaya mediasi gagal, dan apakah Kejaksaan sudah maksimal memfasilitasi dialog secara efektif sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bunyi Pasal 7 menyatakan bahwa "Jaksa wajib memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan tersangka melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan prinsip sukarela, kesetaraan, dan keseimbangan."

Permasalahan yang mencuat adalah tidak adanya instrumen yang baku untuk mengukur keikhlasan atau ketidakmauan korban dalam menolak keadilan restoratif. Apakah penolakan korban murni berasal dari kehendaknya, atau ada faktor tekanan atau ketidakpuasan atas perlakuan selama proses mediasi. Inilah yang perlu diteliti untuk memastikan apakah prosedur sudah berjalan sesuai prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Kejanggalan lain yang juga penting adalah bagaimana Kejaksaan Negeri Ende mengkuualifikasi perkara Rustam Efendi. Meskipun dalam aspek ancaman pidana memenuhi syarat untuk keadilan restoratif, realita kekerasan yang berulang serta luka fisik yang cukup serius membuat penerapan keadilan restoratif menjadi dipertanyakan secara etis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Kejaksaan menafsirkan syarat tidak membahayakan nyawa dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bunyi Pasal 4 menyatakan bahwa "Perkara yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau tidak membahayakan nyawa orang."

Selain itu, adanya perbedaan hasil akhir antara kedua kasus tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan persepsi di masyarakat. Kasus Winda Dewanti dihentikan penuntutannya dengan cepat, sedangkan kasus Rustam Efendi dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini bisa memunculkan dugaan subjektivitas atau ketidakseragaman dalam penerapan kebijakan penghentian penuntutan.

Fakta bahwa perdamaian dalam perkara Winda Dewanti terjadi setelah adanya Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan, sedangkan dalam kasus Rustam Efendi tidak terjadi perdamaian meski sudah difasilitasi, mengundang pertanyaan apakah faktor kekuasaan atau relasi sosial juga berperan dalam memperlancar atau menghambat proses restoratif.

Dari sisi korban, dalam perkara Rustam Efendi, sikap tegas Lily Nurlyah untuk melanjutkan proses hukum mencerminkan adanya kebutuhan akan rasa keadilan yang lebih substansial dibandingkan sekadar penyelesaian damai. Hal ini membuka ruang penelitian tentang seberapa jauh hak-hak korban benar-benar dihormati dalam praktik keadilan restoratif.

Kejanggalan lainnya adalah ketidakhadiran mekanisme supervisi atau audit independen terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan keadilan restoratif di daerah, termasuk dalam menilai apakah mediasi dijalankan sesuai prinsip sukarela dan tanpa tekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bunyi Pasal 5

huruf d menyebutkan bahwa “Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.”

Adanya kemungkinan disparitas antara penerapan teori keadilan restoratif dalam peraturan dengan praktik lapangan juga menjadi alasan mendesak bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh. Apakah selama ini penghentian penuntutan benar-benar memberikan pemulihan kepada korban atau hanya berorientasi pada efisiensi penyelesaian perkara.

Dari sudut pandang akademik, penelitian terhadap kasus di Kejaksaan Negeri Ende ini akan memperkaya literatur hukum tentang perbandingan antara teori dan praktik keadilan restoratif di Indonesia, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat lebih akuntabel, adil, dan transparan ke depan. Dengan alasan-alasan dan kejanggalan tersebut, maka penelitian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa tujuan utama hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum, benar-benar tercapai dalam setiap perkara pidana.

Berdasarkan, hasil penelitian dari latar belakang masalah yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **penegakan HUKUM DENGAN PENDEKATAN Keadilan Restoratif TERHADAP PELAKU PERKARA PENGANIAYAAN DI LIHAT DARI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN**

BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ende).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang masalah yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende, dengan mengkaji perbedaan penerapan dalam dua kasus spesifik, yaitu kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana Kejaksaan Negeri Ende menilai kelayakan dan ketulusan perdamaian antara korban dan tersangka dalam kasus Winda Dewanti, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mediasi pada kasus Rustam Efendi, di mana korban menolak untuk berdamai.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende, dengan fokus pada perbedaan penerapan dalam dua kasus, yaitu kasus Winda Dewanti dan Rustam Efendi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Kejaksaan Negeri Ende mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam hal Kesepakatan damai, Verifikasi iktikad baik dari pihak-pihak terkait, dan Fasilitasi mediasi dalam upaya mencapai penyelesaian perkara yang adil dan substansial.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Ende.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini memperluas wawasan akademik mengenai bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam sistem penuntutan pidana, serta memperkaya literatur hukum mengenai penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu-isu penegakan hukum dengan pendekatan non-punitif dan berbasis pemulihan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung, antara lain:

1) Bagi Penegak Hukum

Bagi pengambilan keputusan di tingkat kejaksaan, memperbaiki mekanisme penanganan perkara, serta memberikan panduan dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berbasis pada pemulihan.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan pemahaman tentang proses hukum yang berfokus pada keadilan restoratif. Hal ini bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan solutif, serta meminimalisasi prasangka negatif terhadap sistem peradilan pidana yang sering dianggap hanya berfokus pada hukuman.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti bagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterapkan di Kejaksaan Negeri Ende, khususnya terkait dengan perkara penganiayaan. Penelitian ini juga akan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan tersebut, serta apakah penghentian penuntutan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan prinsip yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut (Parasdika, 2022, : 84).

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peraturan tersebut memberikan ruang bagi penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam perkara penganiayaan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap syarat dan ketentuan penghentian penuntutan, serta penerapan prinsip keadilan restorative (Huda, 2021:12).

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yakni melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan antara lain Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, Pelaku Penganiayaan (Tersangka), Korban Penganiayaan dan Pihak Lain yang Terkait. (Pramiyati, 2017:686)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel serta mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini. (Pratama, 2019:127).

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang akurat, maka peneliti akan memakai beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial dan hukum, terutama untuk menggali informasi dari sumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ende, Pelaku Penganiayaan (Tersangka), Korban Penganiayaan dan Pihak Lain yang Terkait.

2. Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dokumen-dokumen kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ende, serta regulasi terkait lainnya (Romdona, 2025:47).

1.5.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik kategorisasi, koding, deskripsi tematik, dan analisis konten untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan tersangka Winda Dewanti di Kejaksaan Negeri Ende (Majid, 2017:9).

1.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ende di Jalan El Tari Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab dengan pembahasan yang terdiri sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pelaku Perkara Penganiayaan, dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Bab III : Penegakan Hukum Terhadap Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Ende berisi tentang Gambaran Umum Kejaksaan Ende Negeri , Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana, Analisis Studi Kasus, Dasar Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan, Mekanisme Penegakan Hukum melalui

Pendekatan Restoratif, dan Perspektif Hak Korban dalam Penerapan Keadilan Restoratif.

Bab IV : Faktor Internal yang Mempengaruhi Inkonsistensi, Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Inkonsistensi, dan Kelemahan Regulasi dan Pedoman Teknis

Bab V : Kesimpulan dan Saran